

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) SUBSIDI KECAMATAN TOMINI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Hasmir¹, Hasbullah, dan Christian Tindjabate²

hasmirmantaili@gmail.com

¹(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

²(Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Policy Social Security Administering Agency BPJS subsidy Tomini District Parigi Moutong District. The type of research used qualitative descriptive. The type of data used is primary data and secondary data. While data collection techniques, conducted through observation, interviews, documents. Furthermore, withdrawal technique of informant use purposive. Data analysis used is interactive model Miles and Huberman, consisting of data reduction, data presentation, and conclusion. The theory used in this research is the theory of Van Meter and Van Horn. As for from this research the researcher put forward some research result that is: standard and target of policy, communication between executing agency, characteristic of executing agency. Based on the results of the research, that Policy Social Security Administer Agency BPJS subsidy Tomini District Parigi Moutong District. Referring to the Act No. 24 of 2011 on BPJS that implemented was not running optimally. Coordination is maintained by the District Government, Village Governments, and the Community receiving BPJS in implementing policies that are not yet technically clear. While the distribution of subsidized BPJS card for its implementation has not shown the maximum result of the implementation of the policy.

Keywords: *Standards and Objectives, Communication between Organizations*

Negara dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk memberikan suatu jaminan khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang secara khusus mengatur Jaminan Sosial Tenaga Kerja swasta meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Maka dapat dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baru. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pembentukan BPJS dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada atau baru, dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial. Dengan demikian upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional merupakan pelaksanaan program jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 tentang BPJS. Dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) dan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya tenaga kerja yaitu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja selanjutnya berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.

Semangat dikeluarkannya program pemeliharaan kesehatan dalam program BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah baru yang diterapkan agar jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dikelola tersendiri dengan tujuan agar kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Khusus untuk program jaminan kesehatan, para pekerja/buruh dapat mengikuti dengan cara mendaftarkan kembali dalam program BPJS Kesehatan. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar pekerja atau buruh berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban membayar iuran kepesertaan program BPJS Kesehatan setiap bulan.

Telah terbukti bahwa keberadaan masyarakat miskin yang menerima badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Subsidi kembali marak dibicarakan, bahkan di setiap daerah termasuk di puskesmas Tomini sehingga kesehatan propinsi, Kabupaten maupun puskesmas kecamatan berusaha untuk menjalankan program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) *Subsidi* ini dengan sebaik baiknya agar masyarakat di kecamatan Tomini bisa merasakan dampak positif dari program (BPJS) Subsidi.

Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial (BPJS) Subsidi merupakan program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam hal mendapatkan jaminan kesehatan gratis memang benar tetapi hanya belum sesuai dengan yang di harapkan karna kenyataannya sangat bertolak belakang antara kebijakan

BPJS Subsidi dengan realita di lapangan contohnya di puskesmas Tomini masyarakat masih sebagian besar belum mendapatkan kartu BPJS dari 12.282 jiwa yang memiliki kartu BPJS hanya sekitar 4.320 jiwa serta desa Ogotumubu dari jumlah kepala keluarga 420 kepala keluarga yang berhak mendapatkan kartu BPJS subsidi 150 kepala keluarga akan tetapi yang mendapatkannya hanya 80 kepala keluarga begitu pula hal yang sama di desa Ambesia Barat dari jumlah kepala keluarga 410 kepala keluarga dan yang berhak mendapatkan kartu BPJS subsidi sebanyak 160 kepala keluarga akan tetapi yang mendapat kartu BPJS subsidi hanya 49 kepala keluarga dan untuk mendapatkan kartu BPJS sangatlah sulit.

Jika dilihat permasalahan yang muncul berkaitan dengan program BPJS, subsidi di Kecamatan Tomini, maka tampak jelas terjadi gap antara harapan dengan kenyataan atau hasil observasi yang selanjutnya menjadi alasan kuat dan menarik untuk peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Subsidi (BPJS) di Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu masalah/keadaan/peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Penggunaan metodologi merupakan hal yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang diseleksi dapat terjawab dengan secara valid, reliabel dan objektif dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kebijakan publik.

Jaminan Sosial, (BPJS) Subsidi Dasar penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan. Menurut Moleong (2001)

dalam Suryanto (2005:41), penelitian *Field Research* tidak hanya terbatas pada pengumpulan data tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Selain itu, semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program badan penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Subsidi di puskesmas tomuni kabupaten parigi moutong, terlebih dahulu peneliti memberikan definisi konsep sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian. Adapun indikator yang dapat diukur dalam implementasi program badan penyelenggara jaminan Sosial, (BPJS) Subsidi di puskesmas tomuni yaitu model implementasi Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang berhak menerima kartu BPJS Subsidi tersebut sesuai dengan ukuran atau kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah dan memberikan kepada orang yang telah menjadi sasaran kebijakan yaitu masyarakat miskin.
- b. Sumber daya, efektif dan tidaknya sebuah kebijakan ditentukan oleh sumber daya yang ada. Beberapa sumber daya yang diperlukan dalam mengimplementasikan ke yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan tim pelaksana program badan penyelenggara jaminan kesehatan BPJS Subsidi.
- c. Komunikasi antar badan pelaksana, dalam hal ini komunikasi antara badan pelaksana sangatlah penting untuk dilakukan agar pelaksanaan Program BPJS dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Tujuan dan sasaran dari program badan penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS) di sosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya penyelewengan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan pegawai puskesmas tomuni mengenai program BPJS, Subsidi makah

mudah untuk memberikan penjelasan pada masyarakat.

- d. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Ketika lingkungan sosial, ekonomi dan politik menunjang dilaksanakannya kebijakan maka, kebijakan tersebut akan sukses namun sebaliknya kebijakan akan gagal. Sehingga lingkungan dan ranah implementasi kebijakan BPJS Subsidi, dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi tersebut.
- e. Sikap pelaksana, sikap pelaksana merupakan variabel paling penting dalam implementasi, ketika program BPJS Subsidi, akan di implementasikan maka seberapa antusias masyarakat yang merespon program tersebut. Antusias dan responsif yang baik merupakan sikap pelaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan sasaran Kebijakan

Untuk memahami implementasi kebijakan, maka salah satu variabel yang mempengaruhi adalah kebijakan sasaran agar dapat di realisasi. Subarso (2005:99)

Berpendapat bahwa apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen pelaksana implementor. Jika di kaitkan dengan fenomena yang terjadi di kecamatan Tomuni implementasi kebijakan badan penyelenggaraan jaminan sosial, subsidi (BPJS) mengacu pada tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara salah seorang masyarakat yang mendapatkan kartu BPJS, subsidi (bapak, kanduyu) mengatakan bahwa:

Pemeratan kartu BPJS, subsidi di Kecamatan Tomuni belum sesuai standar dan sasaran yang diharapkan karena tujuan kebijakan pemerintah di peruntukan bagi masyarakat miskin, ternyata masih ada masyarakat yang berhak belum mendapatkan kartu BPJS, subsidi hal ini di karenakan adanya penyalagunaan jabatan yang di mamfaatkan

sebagian aparat Desa sehingga yang mereka data di dominasi keluarga atau kerabat terdekat, bagi saya seharusnya kami merasakan mamfaat jaminan kesehatan subsidi, karena saya memang masih serba kekurangan, oleh karena itu BPJS subsidi ini cukup membantu saya mengatasi beban keluarga saya dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan (wawancara, tanggal 23 Desember 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sangat membantu bagi masyarakat miskin terutama mengatasi persoalan kesehatan, namun masyarakat menganggap bahwa pemerataan kartu BPJS subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran, hampir di setiap desa di Kecamatan Tomini masih mengalami persoalan yang sama, masyarakat yang menilai pemerataan kartu BPJS subsidi, belum adil karena ada masyarakat yang mendapatkan kartu BPJS subsidi tapi dia masuk kategori masyarakat mampu artinya masih ada masyarakat miskin belum mendapatkan kartu padahal mereka tergolong masyarakat miskin yang berhak mendapatkankartu BPJS subsidi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang belum mendapatkan kartu BPJS subsidi, (bapak, sabarun) mengatakan bahwa:

Pemerataan kartu BPJS subsidi belum efektif, berarti sasaran belum sepenuhnya tepat, saya sebenarnya termasuk masyarakat miskin, tapi mengapa saya tidak mendapat, tapi saya bertanya kepada pemerintah Desa, tapi pemerintah Desa mengatakan memang semuanya belum terdata, ini disebabkan kelalaiyan petugas yang di beri kewenangan tidak maksimal untuk melakukan pendataan sehingga sebagian masyarakat miskin banyak yang belum menerima karu BPJS mudah-mudahan tahap berikutnya anda di usahakan mendapat kartu BPJS subsidi. (wawancara tanggal 26 Desember 2016)

Hasil wawancara kedua informan tersebut merupakan suatu pembuktian bahwa pemerataan kartu BPJS subsidi kecamatan

Tomini belum sepenuhnya merata secara maksimal, hal ini peneliti mengklarifikasi kedua pendapat informan tersebut pada salah seorang informan yang berasal dari unsur pemerintahan yaitu kepala Desa ogotumubu alias (badrun hani) mengatakan bahwa:

Memang implementasi kebijakan BPSJ subsidi dapat dilaksanakan, akan tetapi pemerataan masih perlu kerja sama dengan pihak terkait, agar sasaran dan tujuan pemerintah manfaat tepat sasaran, karena di Desa kami masih ada yang sebenarnya berhak tapi tidak terdata, ini dikarenakan adanya kesalahan keterlambatan data yang di minta dari masyarakat sehingga muncul persepsi masyarakat bahwa pemerataan kartu BPJS subsidi belum semuanya tepat pada sasaran (wawancara, tanggal 27 Desember 2016).

Hal tersebut juga sama di kemukakan oleh (Bapak Tamrin mangence) selaku kepala Desa Ambesia barat. pada saat wawancara dengan peneliti, (wawancara tanggal 2 Januari 2017). Hasil wawancara masyarakat dan pemerintah setempat di perjelas kembali kembali oleh (Hamran Pakaya. SE) selaku camat Tomini bahwa:

Pemerataan Iplementasi Kebijakan BPJS subsidi di Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi moutong sudah di dilaksanakan, hanya saja ada beberapa kepala Desa yang masyarakatnya masih mengeluh tentang kartu BPJS mereka mengatakan seharusnya kepala Desa memprioritaskan masyarakat miskin bukan mendafta orang yang ekonominya layak sehingga namu pemerataan masih perlu pembenahan secara profesional, karena sasaran BPJS, subsidi peruntukan untuk masyarakat kategori miskin yang terdaftar dalam daftar penerima mamf BPJS subsidi, namun dalam hal pendataan belum terdaftar secara keseluruhan. (Wawancara, Tanggal 7 Januari 2017).

Hasil wawancara kepala puskesmas Tomini dengan peneliti (ibu Antu Ande, Kep) bahwa:

“Program BPJS, subsidi standar dan sasaran yaitu untuk membantu masyarakat yang di kategorikan penghasilan rendah (miskin) dengan program PPJS, subsidi kami dari pihak pelayana kesehatan untuk BPJS, subsidiakan memberikan pelayanan yang maksimal jika ada masyarakat yang melakukan pengobatanakan tetapi kami tidak akan melayani masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS, subsidimeskipun kategori masyarakat miskin dan selama kami melayani peserta BPJS subsidi memang ada beberapa masyarakat yang kami rasa tidak layak mendapatkan kartu BPJS subsidi karena dia masyarakat yang ekonominya mampu sehingga kami bingung denan sistem pendataan di Desa (Wawancara, Tanggal 7 Januari 2017)

Hasil wawancara keenam informan tersebut membuktikan bahwa inplementasi kebijakan BPJS, subsidi dapat di laksanakan, tetapi masih ada kekurangan-kekurangan dalam mengimplementasikanya terbukti jawaban informan mengatakan pemerataan BPJS, subsidimasih membutuhkan pengelolaan yang baik dengan catatan perlu di kelolasecara koordinatif agar semua penerima manfaat merasakannya, jika hal tersebut terkoordinasi dengan baik maka sasaran dan tujuan kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Sumber Daya

Van Metter & Van Hom serta George C. Edwards III (subarsono, 2005 : 99) Dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu : Staf, Informasi, Wewenang, dan fasilitas. Di kantor kecamatan Tomini, dimana sumber daya yang melakukan pendistribusian kartu BPJS, *supsi* adalah para pemerintah Desa setempat.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang masyarakat penerima artu BPJS, *supsi* atas nama (kanduyu) berpendapat bahwa:

Sumberdaya manusia (sekdes) yang melakukan pendistribusian kartu BPJS, subsididi Desa memiliki kemampuan untuk melaksanakan

tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu setiap masyarakat membawa kartu tanda bukti (KTP/KK) sesuai data yang telah disepakati oleh pemerintah (Wawancara tanggal 23 Desember 2016)

Hasil Wawancara tersebut, membuktikan bahwa sumber daya manusia (sekdes) Desa yang melakukan pendistribusian katru BPJS, subsididapat dilaksanakan sesuai aturan yang telah di tentukan. Secara administrasi pelayanan tidak dilaksanakan jika masyarakat tidak membawa persyaratan yang di tentukan. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang masyarakat yang belum mendapatkan kartu BPJS, subsidi(Sabarun) berpendapat bahwa: *Sumberdaya manusia di kantor kecamatan Tomini, tidak bisa berbuat apa-apa tentang data yang ada mengenai jumlah masyarakat miskin,karena data tersebut bukan kewenangan pemerintah kecamatan,akan tetapi di serahkan kepada pemerintah Desa, yang jelas bagi saya program pemerinta tentang BPJS, supsi bagi masyarakat miskin, sangat membantu masyaraka. Bukan saya yang menerima BPJS. Subsiditapi saya mengagap program tersebut sangat membatu bagi keluarga miskin,apabila sekarang ini biaya pelayanan kesehatan sangattlah mahal sedangkan jika ada kartu BPJS,subsidi sangat membantu (Wawancara, 26 Desember 2016)*

Hasil wawancara tersebut,dapat dibuktikan bahwa program BPJS, subsidisangat membantu bagi masyarakat miskin yaitu yang tadinya harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal dalam hal pelayanan kesehatan tapi dengan adanya program BPJS, subsidimaka masyarakat miskin merasa ringan dalam pelayanan kesehatan, oleh karena itu harapan masyarakat kartu BPJS, subsidi bisa merata untuk masyarakat miskin.

Hasil wawancara informan tersebut baik menerima BPJS,subsididan yang belum menerima BPJS,subsidi, di pertegas oleh salah seorang unsur pemerintah (Tamrin Mangence) selaku kepala Desa Ambesia barat mengatakan bahwa:

Sumber daya yang ada di Desa kami mempunyai kewenangan mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan kartu BPJS, subsidi tersebut punya keterbatasan yang tergantung jumlah masyarakat yang mendapatkan kartu BPJS, subsidi, saya selaku kepala Desa hanya mengikuti aturan. (Wawancara 2 Januari 2017)

Berdasarkan penjelasan singkat dari Bapak Hamran Pakaya selaku Camat Tomini dengan Peneliti menjelaskan bahwa:

“Dalam segi implementasinya sebenarnya sudah berjalan walaupun belum semua Desa, akan tetapi untuk beberapa Desa tertentu sudah berjalan seperti di Baik. Oleh karena itu dengan adanya program BPJS, subsidi ini mudah-mudahan program ini kedepan akan lebih baik dan bisa lebih terarah untuk kesejahteraan masyarakat husus masyarakat miskin (Wawancara tanggal 9 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang berkaitan erat dalam pelaksanaan kebijakan pelaksanaan BPJS, subsidi meliputi sumber daya manusia sudah baik.

Komunikasi antar Organisasi terkait Program BPJS, subsidi

Komunikasi antar organisasi menurut Van Meter dan Van Horn merupakan hal yang sangat penting dalam model implementasi kebijakan, komunikasi dimaksudkan untuk menyampaikan tujuan kebijakan publik yang dikeluarkan serta analisis efek/bias dari kebijakan itu terhadap organisasi yang lain sehingga implementasi dari kebijakan itu dapat terlaksana dengan baik, komunikasi bukan hanya dilakukan pada saat kebijakan itu dikeluarkan akan tetapi selama kebijakan itu berproses/dijalankan.

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar

instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut, komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:161) dikatakan bahwa apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan kebijakan harus ada komunikasi untuk para pelaksananya. Selanjutnya dikatakan bahwa jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kegiatan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa di capai.

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dengan demikian prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten, di samping itu koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil,

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah sosialisasi yang merupakan sebuah proses pengkomunikasian kegiatan sebagaimana dikatakan Camat Tomini (Hamran pakaya. SE) mengatakan bahwa:

“Iya wajib itu karena dalam setiap pelaksanaan program kebijakan yang menyangkut dengan masyarakat harus ada sosialisasi yang harus dilakukan sebelum kegiatan itu berlangsung, agar masyarakat dapat mengerti maksud dan tujuan dari program ini, dan berhubungan dengan pelaksanaan program Padat BPJS,

subsidi kami selalu mengadakan rapat Koordinasi antar unsur pemerintah kecamatan dan kepala-kepala Desa yang berkompeten terhadap kebijakan ini”.(Wawancara 9 Januari 2017)

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Desa Ogotumubu (Badrun Hani) tentang pelaksanaan sosialisasi tentang program BPJS, subsidi menyatakan bahwa:

“Sosialisasi menyangkut program BPJS, subsidi saya kira sudah cukup bagus, karena selalu ada koordinasi dan pertemuan dengan masyarakat untuk membahasa pelaksanaan program dari BPJS, subsidi begitu juga dari kecamatan selalu berkoordinasi kepad kami selaku pemerintah Desa”(Wawancara 7 Januari 2017)

Namun pendapat yang berbeda diungkapkan oleh masyarakat (bapak Sabarun) yang tidak mendapatkan kartu BPJS, subsidi terkait dengan intensitas sosialisasi program BPJS, subsidi mengatakan bahwa :

“Setahu kami jarang ada undangan untuk pertemuan dalam rangka membahas program BPJS, subsidi sehingga saya sudah merasa tidak lagi di perhatikan dalam hal mendapatkan hak yang mestinya kita”(Wawancara 27 Januari 2016).

Pernyataan senada juga dikatakan oleh masyarakat yang mendapat kartu BPJS, subsidi (bapak Kanduyu) mengatakan bahwa :

“tidak ada pemberitahuan kepada kami peserta BPJS, subsidi kalau ada pertemuan apalagi membahas tentang evaluasi kegiatan program BPJS, subsidi yang hanya kami di beri kartu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hanya sebatas itu yg di katakan kepada saya”(Wawancara 23 Desember 2016).

Berdasarkan pernyataan 2 informan Diatas peneliti, dapat disimpulkan bahwa memang selama pelaksanaan program BPJS. subsidi ini tidak dibarengi dengan sosialisasi atau pemberitahuan informasi terbaru tentang apa-apa saja yang berubah mengenai program BPJS, subsidi tersebut sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu tentang kebijakan-

kebijakan yang mengenai program BPJS, subsidi ini.

Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan program, maka aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu adanya kejelasan atas informasi yang disampaikan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kebingungan dan perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan masyarakat miskin sebagai sasaran kegiatan.

Kejelasan informasi dimaksud, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Kaitannya dengan dimensi kejelasan informasi diatas, Kepala Puskesmas Tomini(Ibu Antu Ande, Kep) menjelaskan bahwa)

“menyangkut informasi kami dari PUSKESMAS mengenai pelaksanaan program BPJS, subsidi kami kira sudah sangat jelas tertuang pada petunjuk teknis dan dan sasaran dari kebijakan dan kami sebagai yang dipercayakan sebagai pelaksana pemberi pelayan medis untuk kebijakan ini selalu memberikan informasi kepada Camatn sampai di kepala Desa Tetapi terkadang ada kepala Desa yang hanya mengagap program BPJS, subsidi ini di angap spele ”(wawancara 7 Januari 2016)

Dari pernyataan informan dan hasil penelitian di lapangan, oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa yang sering terjadi adalah masih kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pelaksana dengan berbagai pihak yang terkait, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dari masyarakat. Kurangnya koordinasi sehingga masyarakat mengindikasikan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebijakan ini.

Komunikasi dan koordinasi mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan, dalam penelitian ini peneliti menemukan kenyataan bahwa komunikasi dan koordinasi yang sudah dibangun selama ini sudah dilakukan tetapi masih kurang optimal, pelaksana kegiatan baik secara horisontal maupun vertikal perlu ditingkatkan sehingga dapat terwujud sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas.

Karaktersitik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Cmat Tomini (Hamran Pakaya. SE) menjelaskan bahwa:

“Setiap organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun swasta memang seharusnya mempunyai kemampuan kapasitas yang memadai dalam melaksanakan setiap kegiatan, apalagi kegiatan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat adapun pelaksana dalam program BPJS, subsidi yang besentuhan dengan pemerintah Desa yang mana koordinasi dengan kami selaku pemerintah kecamatan sudah baik (Wawancara 9 Januari 201)

Selanjutnya meyangkut karakteristik organisasi pelaksana dengan kapasitasnya masing-masing dalam kegiatan ini menurut Kepala Desa Ambesia barat (Tamrin Mangence) menyampaikan bahwa :

“sayasebagai pelaksana yang diberi tanggung jawab sebagai pelaksana untuk masyarakat saya, selama ini saya kira sudah maksimal untuk memberikan menjalankan tugas saya.,(Wawancara 26Desember 2016)

Sejatinnya para pelaksana program implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparat yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan merupakan tugas pokoknya serta

di dukung oleh kompetensi dasar yang harus dimiliki. Kemampuan yang tidak merata sering terjadi pada suatu organisasi, dalam memberikan pelayanan kepada penerima. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan serta dapat mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik melalui kapabilitas pelaksana, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Puskesmas (Ibu Antu Ande, Kep) bahwa:

“Seharusnya memang setiap organisasi pelaksana sudah harus paham dan mengerti tentang apa yang harus mereka kerjakan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai sampai dengan evaluasi kegiatan, karena pekerjaan ini sudah menjadi bagian dair tanggung jawab masing-masing pelaksana kegiatan, dan saya kira kuncinya juga terletak pada pimpinan Aparatur Kecapatan dan Desa bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat ”(Wawancara 7 Januari 2017).

Dari kutipan wawancara dan hasil penelitian dilapangan, oleh peneliti dapat dianalisis bahwa para agen pelaksana dalam implementasi kebijakan ini suda memahami sepenuhnya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai organisasi pelaksana.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:144) adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial,ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan masnyaratakan kondisi lingkungan eksternl yang kondusif.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2011:167) dampak kondisi ekonomi sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Faktor-Faktor ini

mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan pelaksana.

Selanjutnya untuk tujuan ilustratif, Van Meter dan Van Horn mengusulkan agar kita memberi pertimbangan pertanyaan-pertanyaan mengenai lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan a). Apakah sumber ekonomi dalam yuridiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi. b). Sejauh mana kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?. c). Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan?. d). Apakah elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan ?. e). Apakah sifat pengikut dari yuridiksi atau organisasi pelaksana dan a

Terkait dengan indikator lingkungan sosial, ekonomi dan politik terhadap implementasi kebijakan program Padat BPJS, subsidi, Camat Tomini (Hamran Pakay. SE) mengatakan bahwa:

“Kalau dampak ekonomi dan sosialnya sudah jelas lah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin atau untuk peningkatan kehidupan sosialnya karena memang tujuan dari program ini adalah bagaimana agar program BPJS, subsidi itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat miskin husunya Dmasyarakat yang ada di wilaya Kecamatan Tomini”(Wawancara 9 Januari 2017)

Demikian halnya Kepala Seksi Sosial Kepala puskesmas (Ibu Antu Ande, Kep) memberikan pernytaannya ketika diwawancarai oleh peneliti menyangkut dengan dampak sosial, ekonomi dan politik adalah :

“Dengan adanya program BPSJ. Subsidi ini masyarakat menjadi terbantu kehidupan dalam hal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu juga berdampak langsung pada peningkatan kesahatan, “(Wawancara 7 Januari 2016).

Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa kondisi lingkungan ekonomi sosial dan politik dari yuridiksi atau

organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan-badan pelaksana, kecenderungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri. Variabel lingkungan tersebut dipandang mempunyai pengaruh langsung pada pemberian pelayanan publik

Oleh karena itu kesenjangan ekonomi dan sosial bagi masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mendukung program Padat karya ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Hamran pakaya. SE) selaku kepala Desa Ogotumubu berikut ini :

“Pengaruhnya sangat besar untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang sebelumnya sulit mendapatkan pelayanan Kesehatan takan tetapi dengan adanya program BPJS, subsidi ini mereka dapat meringankan beban untuk beobat, karena memang tujuannya dari program ini adalah meingkatkan kesejahteraan dalam hal kesehatan masyarakat miskin” (Wawancara 27 Desember2016)

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dilapangan serta merujuk pada kutipan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk program BPJS, subsidi ini salah satu cara untuk mengetahui seberapa besar dampak program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat pesertanya dapat dilihat dari kontribusi program tersebut terhadap kegiatan pelayanan kesehatan. Karena di dalam program BPJS, subsidi ini masyarakat miskinlah yang menjadi objek kegiatan ini tentunya program ini akan mempunyai kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sikap Para Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:143), sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan

yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri pertama, pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak, dan ketiga intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman pelaku tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting.

Menurut Van Meter dan Van Horn ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni : tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan yang ada dan lebih disenangi. Dalam keadaan seperti ini Van Meter dan Van Horn menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawas dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi. Oleh karena itu para pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak individu yang berasal dari kecenderungan yang beragam.

Disposisi ini merupakan keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melakukan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi yang berkaitan dengan bagaimanasikap dan komitmen para pelaksana terhadap program, dimana pelaksanaan program kadangkala bermasalah apabila

pelaksana yang terkait didalamnya tidak dapat menjalankan program dengan baik. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan atau program dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu program juga tidak akan efektif.

Oleh karena itu, Van Meter dan Van Horn menaruh perhatian yang sangat serius pada sikap dari pelaksana kebijakan publik sebagai prasyarat keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan. Pemahaman akan kebijakan sangatlah penting, begitu pula dengan respon dari implementor yang pastinya sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Hal ini terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik. Mengenai hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Camat Tomini (Hamran Pakaya. SE) bahwa :

“Respon dari para pengelola dan pelaksana kegiatan yang terlibat dalam kebijakan ini adalah menjadi hal yang penting. Karena apabila mereka tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka kerjakan dan tidak memahami substansi dari setiap pekerjaan, tentunya akan berdampak buruk pada pekerjaan yang telah di programkan.” (Wawancara 7 Januari 2017)”

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Desa Ogotumubu (Badrin Hani) sebagaimana dari hasil wawancara berikut ini :

“Pada umumnya pemahaman kami tentang pelaksana kegiatan PBPJS. subsidi ini menurut saya semua baik dan selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sampai selesai, karena dalam setiap melaksanakan kegiatan kami dari pemerintah Desa selalu memberikan arahan pada masyarakat terkait kegiatan mengenai

proses program BPJS. subsidi”(Wawancara 27 Januari 2017)

Hal serupa di kemukakan dikemukakan oleh Kepala Desa Ambesia Barat (Tamrin Mangence) dari hasil wawancara dengan peneliti berikut ini:

“Setiap program dari pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan melibatkan unsur masyarakat banyak, tentunya kami sebagai Pemerinta Desa sangat merespon secara positif dan mendukung sepenuhnya apa yang telah di programkan pemerintah untk Kesejahteraan masyarakat”(Wawancara 26Januaris 2016).

Intensitas terhadap kebijakan yakni sejauh mana para implementor melakukan kontrol terhadap kebijakan ataupun program yang dilaksanakan, implementor yang baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementor kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

Terkait dengan intensitas disposisi implementor ini, Kepala puskesmas Tomini (Ibu Antu Ande. Kep) mengatakan bahwa :

“Pada umumnya kami di Puskesmas Tomini sebagai pelaksana Pengendali kegiatan dalam hal ini pelayanan kesehatan sudah melaksanakan tugas kami secara maksimal dengan kewenangan kita masing-masing, namun perlu kita ketahui terkadang sebuah kebijakan pelaksanaannya tidak semulus apa yang kita pikirkan karena di dalamnya terdapat berbagai macam karakter, dan berbagai macam keinginan, oleh sebab itu saya selalu mengingatkan kepada para pegai puskesmas agar selalu berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ada agar program ini berjalan dengan baik”(Wawancara 7 Januari 2017)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan hasil wawancara dengan para informan dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sikap para implementor dan masyarakat penerima manfaat pada umumnya sangat mendukung dan mengapresiasi secara positif terhadap setiap pelaksanaan kebijakan program Padat BPJS,subsidi sehingga peniliti menyimpulkan bahwa program ini sudah terlaksana dengan efektif.

Motivasi adalah sebuah bentuk dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan atau mekanisme psikologi dalam diri setiap aparatur di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sehingga mendorong dirinya memberikan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan instansi berdasarkan visi dan misi yang ada sejalan dengan apa yang dikehendaknya. Kekuatan, dorongan, kebutuhan, tekanan dan mekanisme psikologi yang ada dalam diri setiap ASN di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran Kebijakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, subsidi (BPJS) belum berjalan optimal dan belum mencerminkan kondisi ideal sesuai dengan kinerja kebijakan dan ekspektasi masyarakat dengan berbagai regulasi yang mengaturnya, hal ini dapat kita ketahui melalui beberapa aspek yaitu :
 - a. Standar dan tujuan Kebijakan yang pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat terlaksana dengan

sepenuhnya dan tercapai dengan maksimal.

- b. Karakteristik organisasi pelaksana yang cenderung belum memahami sepenuhnya petunjuk yang ada
- c. Sikap para pelaksana yang terkesan cuek terhadap pekerjaan bila menemukan masalah yang ada di lapangan
- d. Aspek sosial, ekonomi dan politik lebih didominasi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat, yang berpengaruh terhadap kondisi kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Rekomendasi

Dari kesimpulan hasil penelitian yang diuraikan di atas, untuk mencapai sasaran kebijakan yang optimal sesuai dengan kinerja kebijakan yang diharapkan, maka ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Tomini untuk melakukan pembenahan dari berbagai aspek, yaitu:

1. Para pelaksana kebijakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, subsidi (BPJS) kiranya dapat mengoptimalkan komunikasi baik antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat miskin penerima kebijakan.
2. Bagi pelaksana kebijakan diberikan pemahaman tentang eksistensinya dalam implementasi kebijakan sehingga diharapkan adanya perubahan pola pikir dan tingkah laku pada saat melaksanakan kebijakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, subsidi (BPJS) ini.
3. Pendampingan dan pengawasan dari pihak aparat Kecamatan dalam menyukseskan implementasi kebijakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, subsidi (BPJS) ini sangat dibutuhkan dan perlu ditingkatkan mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.
4. Intensitas sosialisasi perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian serius bagi Pemerintah Kecamatan seluruh masyarakat sebagai

target group dapat mengetahui dan memahami program apa yang dilaksanakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Secara khusus peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Hasbullah M.Si selaku Pembimbing I dan Dr.Christian Tindjabate, M.Si selaku Pembimbing II yang tidak hanya memberikan bimbingan penulisan artikel ini, tapi juga motivasi kepada peneliti yang tidak ternilai harganya.

DAFTAR RUJUKAN

- Chaizi Nasucha, Harbani Pasolong 2008. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Dunn, William N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Publik policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Grindel, Meriles S. (ed) 1980 *Politics and A Policy Implementation in third World*, Jerse: Princetown Univesity Press.
- Hoongwood, Brian W.& Lewis A. Gunn. 1986. *Policy Analysis For the Real World*, Princeton University Press.
- Islamy, M.Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Rumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: bumi Aksara.
- 2009. *Prinsip-Prinsip Rumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: bumi Aksara.
- Nugroho Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
-2003. *Kebijakan publik formulasi implementasi dan evaluas*. TP. Elex Media Komputindo. Jakarta.
-2008. *Publik policy PT. Elex Media komputindo*. Jakarta.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabetha.

- Subarsono, AG. 2005. *Analisa Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Meter, Donal S. & Carl E. Van Horn.1975. *the Policy Implementation Proccess : A Conceptual Framwork :* London : Sage Publication Inc.
-2011 *public policy*. PT. Elex Median Komputindo. Jakarta.
- Wahab, S.A, 1991. *Analisa Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
-,1997. *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebija negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
-2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari FormulasikeImplementasi Kebijaksanaan Negara*. Penerbit : Bumi Aksara ; Jakarta
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Medpress.
-2012 *Kebijakan Publik Teori proses,dan studi kasus . Edisi dan revisi Terbaru*, Cetakan pertama. Yogyakarta: CAPS.
- UUD, No. 40 tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial Nasiona.
- UUD, No. 24 Tahun 2011 tentang Bpjs kesehatan & Bpjs ketenagakerjaan.